

Menlu Negeri Sakura Berkunjung Ke Indonesia

# RI & Jepang Saling Bantu Sebagai Kokoro-no-tomo

**Sikap Jepang untuk menitikberatkan hubungan yang erat serta bekerja sama dalam membuat Indonesia lebih berkembang tidak akan berubah.**

HAL itu disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dalam wawancara eksklusif secara tertulis dengan *Rakyat Merdeka*, kemarin, dalam kunjungannya ke Indonesia pada 11-13 Agustus ini.

"Saya secara konsisten memertingkatkan hubungan dengan Indonesia seperti itu," terang Kishida.

Menurut Kishida, Jepang dan Indonesia merupakan mitra strategis yang berbagi nilai-nilai dasar yang sama seperti demokrasi, kebebasan dan lain-lain. Selain itu, kedua negara telah tumbuh bersama melalui hubungan kerja sama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan.

Pada saat Jepang dan Indonesia mengalami kesulitan akibat bencana gempa dan tsunami di perairan Sumatera maupun di wilayah timur Jepang, kedua negara bersama-sama saling membantu dan mengatasinya sebagai sahabat sehati, *kokoro-no-tomo*.

Kedatangan Kishida ke Tanah Air, menyusul kesuksesan Indonesia menggelar pemilu dan telah memilih Presiden baru, Joko Widodo (Jokowi) dan pasangan-



Marty Natalegawa (kiri) bersama Fumio Kishida.  
DGETTY IMAGES

nya Jusuf Kalla (JK).  
"Selamat dan rasa hormat dari lubuk hati saya atas kelancaran proses pemilu di Indonesia. Hal ini menunjukkan kematangan demokrasi Indonesia pada dunia internasional," kata Kishida.

Menurut Kishida, sehari setelah pengumuman pemilihan presiden, Perdana Menteri Shinjo Abe telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden terpilih, Joko Widodo mengenai pandangan tersébut dan sepakat untuk bekerja sama agar mempererat hubungan kemitraan strategis ini ke tingkat yang lebih lanjut.

"Diawali dengan kunjungan saya kali ini, Jepang akan bekerja sama dengan pemerintah In-

donesia mendatang. Antara lain untuk penjagaan jaminan keamanan kawasan, peningkatan lebih lanjut hubungan perekonomian," terang Kishida.

"Kami mengharapkan agar Jepang dan Indonesia dapat terus bekerja sama agar tumbuh bersama dalam hubungan yang bersifat saling menguntungkan," harapnya.

Kishida mengingatkan, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jepang dan Indonesia telah berhasil memperdalam hubungannya secara drastis di segala bidang. Hal tersebut tercermin terjalannya mitra strategis pada 2006, dilanjutkan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) pada 2008.

Selain itu, menurut sebuah survei pada 2013 dengan responden perusahaan Jepang, Indonesia menjadi negara yang paling diminati sebagai tujuan investasi mereka. "Kami mengangap bahwa selama ini perusahaan Jepang menjadi jauh lebih aktif dalam berinvestasi di Indonesia, sehingga Jepang turut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terutama di bidang industri manufaktur," jelas pria kelahiran Minami-ku, Hiroshima pada 29 Juli 1957 itu.

Di bawah kepemimpinan presiden mendatang, Negeri Sakura menaruh harapan besar agar Indonesia akan tetap mengambil inisiatif dalam menjaga kestabilan dan kemakmuran di kawasan regional ini.

Selain itu, Jepang selama ini telah mendukung usaha peningkatan perindustrian Indonesia dengan bekerja sama di bidang penataan iklim usaha dan investasi, melalui kerja sama pembangunan infrastruktur sesuai dengan kesepakatan *Metropolitan Priority Area (MPA)* atau Rencana Strategis Kawasan Prioritas Metropolitan di kawasan Metropolitan Jakarta sebagai salah satu contoh.

Jepang, kata Kishida, sangat menghargai tinggi upaya Indonesia yang telah memainkan peran aktif untuk menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan regional melalui pemikiran *Dynamic Equilibrium* (keseimbangan dinamis).

"Hal menggembirakan bagi saya, bahwa saya dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjalin hubungan saling percaya sedemikian rupa sampai sudah pada tahap saling memanggil satu sama lain dengan nama depan masing-masing," tutur Kishida.

"Kami juga telah bersama-sama berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai tantangan internasional melalui berbagai kesempatan. Termasuk pertemuan bilateral dan konferensi internasional lainnya," imbuhnya.

Mengenai konflik di Laut China Selatan, permasalahan yang berdampak langsung pada perdamaian dan kestabilan kawasan regional telah menjadi perhatian seluruh dunia internasional. Jepang berpendapat, sebagaimana telah disampaikan Perdana Menteri Abe dalam *The Shangri-la Dialogue (The 13th IISS Asian Security Summit)*, bahwa semua negara yang berkepentingan harus menaati tiga prinsip dasar "rule of law" atau supremasi hukum kejautan. Yaitu, setiap negara harus menyatakan tuntutannya secara jelas berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Selain itu, setiap negara tidak menggunakan kekuatan maupun ancaman untuk meyakinkan tuntutannya. "Serta setiap negara harus sepenuhnya menggunakan jalan damai untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa," pungkas Kishida. ■ MEL